

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.¹² Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Adapun pengertian perkawinan menurut Dr. Ahmad Ghandur nikah yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sedangkan menurut mazhab Maliki nikah adalah sebuah ungkapan atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.¹³

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

¹² Hilam Hadi Kusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung. Mandar Maju. Hal 1.

¹³ Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta. Graha Ilmu. Hal 4.

Adapun pernikahan secara bahasa berasal dari kata nikah yang berarti berkumpul atau bergabung. Dalam kata lain, pernikahan kerap disebut juga dengan perkawinan. Perkawinan menurut bahasa bermula dari kata kawin ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak (hukum Islam) adalah suatu aqad (ijab dan qabul) yang mehalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukan nikah, menurut syari'at yang di tentukan oleh Islam. Dalam Al-qur'an, kata yang dipakai dalam istilah perkawinan adalah zawa. Kata zawaj bermakna pasangan. Dalam penggunaannya, kata zawaj dimaksudkan kepada perkawinan, sehingga Allah SWT menjadikan manusia berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.¹⁴

2. Dasar Hukum Perkawinan

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan

¹⁴ Indah Purbasari. 2017. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*. Malang. Setara Press. Hal 76.

¹⁵ Hilman Hadikusuma. *Op.cit.* Hal 22.

melaksanakannya merupakan ibadah¹⁶ serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁷ Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁸

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun perkawinan adalah suatu yang wajib ada dalam rangkaian proses pernikahan sementara syarat pernikahan (perkawinan) adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dari unsur rukun pernikahan (perkawinan).

a. Calon Suami atau Calon Mempelai Laki-laki

Calon suami adalah seorang laki-laki yang berakal atau tidak cacat mental, beragama Islam, dan *baligh* dan *mumayyis*. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan dewasa dalam ukuran usia yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1), berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Apabila mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan (baik salah satu mempelai ataupun keduanya) berumur kurang dari yang

¹⁶ Pasal 2 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷ Lihat Pasal 3.

¹⁸ Lihat Pasal 4.

ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, kedua orang tuanya dapat mengajukan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang dirujuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak perempuan”.

b. Wali Nikah

Pada Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Syarat menjadi wali nikah adalah sebagai berikut:

- a) Beragama Islam.
- b) Laki-laki
- c) Mukallaf (baligh dan berakal)
- d) Merdeka
- e) Adil, artinya tidak tampak kefasikan darinya. Syarat ini merujuk pada pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad.¹⁹

Wali nikah sendiri dibagi menjadi dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang berdasarkan garis nasab (keturunan atau status hubungan darah) yang ditarik dari garis keturunan ayah kandung baik ke atas, maupun ke samping, dan ke

¹⁹ Indah Purbasari. 2008. *Hukum Perkawinan Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*. Bangkalan. Imsa Media Utama. Hal 91.

bawah, atau anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan.²⁰ Sedangkan, wali hakim adalah seorang yang bertindak sebagai wali yang timbul karena yang menjadi wali dari perempuan belum baligh, tiada, berhalangan hadir, dan non muslim. Wali hakim bertindak menggantikan wali nasab untuk menikahkan kedua calon mempelai suami istri apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau wali *adhol* (tidak berkenan menikahkan) atau enggan.²¹ Ini sesuai dengan bunyi Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dijelaskan juga dalam Pasal 23 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa dalam hal wali *adhol* atau enggan menikahkan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Tanpa permohonan wali hakim karena *adhol*, pernikahan akan berstatus dapat dibatalkan karena dinikahkan oleh wali yang tidak berhak.

a. Saksi

Kehadiran saksi dalam pernikahan adalah wajib karena merupakan salah satu rukun nikah, tugas dari saksi dalam pernikahan adalah menyaksikan langsung prosesi pernikahan (akad nikah) dan men-sahkan atau tidak men-sahkan perkawinan tersebut. Kompilasi

²⁰ *Ibid.* Hal 7.

²¹ Indah Purbasari. *Op.cit.* Hal 12.

Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai saksi dalam nikah yakni dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), “saksi dalam perkawinan merupakan rukun dalam pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”. Syarat untuk bisa menjadi saksi nikah adalah diatur dalam pasal selanjutnya yakni Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli.”²²

b. Ijab Kabul

Akad nikah adalah prosesi ritual pernikahan yang paling inti yaitu merupakan ijab yang diucapkan oleh wali yang menikahkannya, dan kabul yaitu jawaban yang diucapkan mempelai laki-laki atas ijab dari wali tersebut yang disaksikan oleh dua orang saksi.

Ijab kabul dalam akad nikah merupakan serah terima antara wali dengan laki-laki yang menjadi suaminya. Serah terima ini akan berakibat hukum peralihan kepemimpinan dan tanggung jawab penafkahan dari ayah atau wali kepada suami oleh karena itu, ijab kabul harus tegas, jelas, dan tidak berselang waktu yang menunjukkan tidak ada keraguan dalam menerima kepemimpinan. Ijab kabul juga merupakan bentuk untuk mengalahkan godaan setan yang menghalangi pernikahan dan membujuk manusia untuk

²² Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta. Akademika Pressindo. Hal 28.

terjerumus pada perzinaan. Ketika lafadz ijab kabul disahkan oleh saksi, sah pula pernikahannya.

c. Status Mahar

Mahar adalah harta, benda, jasa yang disyaratkan oleh mempelai perempuan kepada calon suaminya untuk dipenuhi atau diberikan kepada mempelai perempuan pada saat ijab kabul dalam pernikahan.

Mahar dalam Islam hukumnya wajib dipenuhi sebagai suatu pemberian khusus kepada mempelai perempuan atau calon istrinya. Bentuk mahar bisa berupa apapun (harta, benda, jasa) tentunya mahar tersebut harus halal dari sifat dan cara memperolehnya.²³

Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 4 berbunyi "Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanannya) yang sedap lagi baik akibatnya". Besar kecilnya mahar memang tidak ditentukan. Mengenai ketentuan mahar dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak". Artinya mahar haruslah sudah dalam kesepakatan kedua belah pihak.

²³ Indah Purbasari. *Op.cit.* Hal 37.

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan”.

Dengan demikian, sah perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing agama. Apabila para pihak beragama Islam, perkawinannya sah jika dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam. Hukum Islam mengatur sahnya perkawinan adalah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu perkawinan yang dilangsungkan juga tidak boleh terdapat unsur larangan kawin. Perkawinan tersebut harus dilaksanakan dihadapan pegawai catatan nikah, dalam hal ini adalah pegawai Kantor Urusan Agama (KUA).

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang di tentukan undang-undang.²⁴ Berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri

²⁴ Mr. Martiman Prodjohamidjojo MM, MA. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta. Indonesia Legal Centre Publishing. Hal 39.

kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Perceraian yaitu perkataan *thalaq* berasal dari *thalaqa* berarti melepaskan istri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan atau menceraikan istri. Hukum Islam mengatur talaq adalah makruh (perkara yang dibenci Allah dan tidak dianjurkan) namun boleh dilakukan apabila kondisinya memang tidak memungkinkan.

Menurut Dahlan Idhami, lafadz talak berarti melepaskan ikatan,, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.

Menurut Fuad Sa'is yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.²⁵

Pengertian perceraian yang dijelaskan tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Selajutnya dipertegas oleh ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan dapat putus karena Kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”.

²⁵ M. Andi Raihan. 2014. *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. <http://repository.uinjkt.ac.id>. Di Unduh Tanggal 20 November 2017.

Berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.

2. Dasar-Dasar Perceraian

Perkawinan ini dapat putus baik atas sebab alami yakni kematian ataupun sebab yang lainnya seperti perceraian. Putusnya perkawinan ini berbeda dengan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan yang biasanya dilakukan adalah perkawinan tersebut mengandung unsur larangan kawin dalam Hukum Islam atau Peraturan Perundang-Undangan sehingga berstatus batal atau dapat dibatalkan.²⁶ Jika perkawinan dinyatakan batal artinya perkawinan yang terjadi dianggap tidak ada. Hubungan yang mengandung larangan kawin menyebabkan statusnya batal karenanya perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi. Hal ini berbeda dengan putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan

²⁶ Indah Purbasari. *Op.cit.* Hal 128.

tidak mengandung unsur larangan kawin sebelumnya. Perkawinan yang berlangsung sah namun putus.

Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan penyebab putusnya perkawinan dikarenakan oleh tiga faktor yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Hal ini terdapat dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perceraian sebagai putusnya ikatan pernikahan dapat terjadi baik karena cerai talak yang dimohonkan oleh suami ataupun gugat cerai oleh istri (khuluk). Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur putusnya perkawinan karena putusan pengadilan, artinya berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang tidak menjelaskan secara tegas maksud dari putusnya perkawinan karena pengadilan termasuk perbedaan antara putusan pengadilan karena perceraian maupun putusan pengadilan. Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama hanya mengatur mekanisme beracara bagi perkara cerai gugat, talak, dan li'an.²⁷

Perceraian yang diperkarakan di Pengadilan harus disertai dalil gugatan. Dalil tersebut tentunya harus memiliki dasar hukum yang jelas.

²⁷ *Op.cit.* Hal 130.

Alasan-alasan yang diperkenankan sebagai dalil gugatan diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai f Pengaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf a sampai h Kompilasi Hukum Islam (KHI). Alasan-alasan yang memunculkan atau yang menjadi penyebab adanya suatu perceraian meliputi:

- a) Salah satu pihak baik suami maupun istri telah berbuat zina, pemabuk, pemakai narkoba, penjudi, dan perbuatan jelek lainnya dimana perbuatan-perbuatan tersebut sangat sulit untuk disembuhkan.
- b) Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa adanya alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak itu telah mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f) Antara suami atau istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah

tangga.²⁸ Dalam rumah tangga ini, dimana tidak ada yang namanya perdamaian yang ada hanya perselisihan yang mana tidak ada kerukunan untuk bersama lagi.

- g) Suami melanggar taklik talak, poin ini hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak diatur di Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini, pihak suami dengan sengaja meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah selama 2 tahun berturut-turut, kemudian pihak suami melakukan tindak kekerasan pada istri. Dengan demikian istri berhak mengajukan permohonan talak pada dirinya kepada Pengadilan Agama.
- h) Salah satu pihak telah beralih agama. Perkawinan hanya diperkenankan bagi pasangan yang seagama. Jika dalam perjalanan mengarungi rumah tangga, salah satu pihak murtad secara otomatis perkawinan berakhir. Permasalahan hukum yang terjadi pada aturan ini, pasangan yang berbeda agama masuk kategori larangan kawin.²⁹

3. Macam-Macam Perceraian

Ada tiga macam putusnya perkawinan atau perceraian menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu karena :

²⁸ Mr. Martiman Prodjohamidjojo MM, MA. *Op.cit.* Hal 40.

²⁹ Pasal 116 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

a. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan salah satu pihak yaitu suami dan istri meninggal dunia.

b. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal yaitu :

- 1) Talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.
- 2) Berdasarkan gugatan perceraian yaitu perceraian yang disebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak, khususnya istri ke pengadilan.

Talak dibagi menjadi 5 macam yaitu:³⁰

- a) Talak raj'I yaitu talak ke satu atau kedua, dimana suami berhak ruju' selama istri dalam masa iddah.
- b) Talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- c) Talak Ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk kedua kalinya, talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak boleh dinikahi lagi, kecuali

³⁰ A. Zuhrul Muhdlor. 1994. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*. Bandung. Al-Bayan. Hal 93.

pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya.

d) Talak sunny adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan oleh istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci itu.

e) Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (pasal 118 sampai dengan pasal 122 inpres No 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam).

c. Keputusan Pengadilan.

Berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³¹

4. Akibat Perceraian

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akibat putusnya perkawinan dapat dibagi atas cerai talaq dan cerai gugat (khuluk). Akibat hukum setelah jatuhnya talaq diatur dalam Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) meliputi:

a. Suami harus memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya bisa berupa uang atau benda jika suami sudah mencampuri istrinya.

³¹ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sedangkan jika suami belum mencampurinya maka suami tidak wajib memberikahn *mut'ah*. *Mut'ah* adalah santunan yang diberikan kepada istri yang *ditalaq Mut'ah* dibedakan menjadi dua, yaitu: *Mut'ah* wajib yang diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditatpkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul* (sudah dicampuri) dan perceraian itu atas kehendak suami³² dan *mut'ah Sunnah* diberikan oleh bekas suami tanpa adanya syarat yang melekat pada *mut'ah* wajib.³³ Adapun besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dann kemampuan suami.³⁴

- b. Suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah selama masa *iddah* (tidak berlaku jika bekas istri telah dijatuh talak *ba'in* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil). Selama masih dalam masa *iddah*, istri masih belum boleh menikah karena dapat dirujuk oleh bekas suami. Istri tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain sampai masa *iddah* berakhir. Artinya si bekas istri wajib menjaga diri karena itulah bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali bila ia *nusyuz*.³⁵
- c. Suami harus segera melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila bercerai *qabla al dukhul*.

³² Pasal 158 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³³ Lihat Pasal 159.

³⁴ Lihat Pasal 160.

³⁵ Lihat Pasal 150 sampai 152.

- d. Suami memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum meencapai umur 21 tahun. Ayah wajib memberikan biaya pengasuhan anak untuk biaya memlihara dan mendidik anak sampai dewasa. Biaya *hadhanah* ditentukan oleh pengadilan berdasarkan kemampuan ayah atau penghasilan ayah, bila tidak dapat persetujuan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukumm Islam (KHI) diatas, talak juga berakibat hukum pemberian mut'ah dan nafkah pada masa iddah. Waktu tunggu atau iddah berlaku bagi seorang istri yang mana perkawinannya putus, tetapi waktu tunggu tidak berlaku untuk istri yang belum dicampuri suaminya dimana putusnya perkawinannya bukan dikarenakan kematian si suami. Waktu tunggu ditentukan kepada seorang janda, antara lain diuraikan dalam Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)³⁶ sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus putus yang dikarenakan kematian suami atau tunggunya adalah 130 hari. Berlaku untuk janda yang hamil atau tidak.
- b. Perkawinan putus yang dikarenakan perceraian ini ada dua ketentuan yaitu istri yang masih haid, waktu tunggunya tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Istri yang tidak haid sama dengan waktu tunggunya 90 hari.

³⁶ Lihat Pasal 149 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sementara istri dalam keadaan hamil berarti waktu tungguanya sampai melahirkan.
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian sementara istri dalam keadaan hamil berarti waktu tungguanya sampai melahirkan.

Perempuan yang menggugat cerai (khuluk) hilang haknya atas mut'ah sebab perempuan tersebut menggugat untuk diceraikan bukan diceraikan oleh suami. Perempuan yang mengajukan khuluk justru perlu membayar iwadl (uang tebusan atas khuluk atau tebusan untuk cerai). Khuluk diatur dalam Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk. Perceraian yang terjadi akibat khulu, yaitu suatu ikatan perkawinan yang putus karena pihak istri telah memberikan hartanya (iwadl) untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Perceraian yang terjadi atas dasar khuluk artinya perceraian terjadi permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya. Oleh karena itu, bilangan talaq 1 sampai 3 tidak dikenal dalam khuluk, tidak dapat dirujuk namun dapat dilakukan akad nikah ulang.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama

1. Pengertian Sengketa

Sengketa merupakan salah satu hal yang bisa muncul kapan saja dalam kehidupan manusia. Sengketa dapat terjadi mulai dari lingkup

keluarga hingga lingkup hukum.³⁷ Sejak dahulu, penyelesaian sengketa sudah ada dalam latar budaya masyarakat Indonesia sebagai pola penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah, misalnya rembuk desa dan kerapatan adat. Penyelesaian sengketa hukum yang paling sering dilakukan dan paling dikenal oleh masyarakat adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Namun demikian, penyelesaian sengketa melalui pengadilan terkadang tidak memberikan penyelesaian sebagaimana diinginkan oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan juga dikenal memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup mahal. Untuk mengakomodir keinginan-keinginan para pihak ini, kemudian muncul beberapa alternatif untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak, untuk dimensi hukum perdata Islam maka arahnya ke Pengadilan Agama.

2. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi

Litigasi merupakan penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan.³⁸ Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir

³⁷ Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 5.

³⁸ Tri Jata Ayu Pramesti. *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. <https://hukumonline.com>. Diunduh pada tanggal 20 November 2017.

(*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.³⁹ Adapun tahapan penyelesaian perkara secara litigasi di Pengadilan Agama sebagai berikut :

1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.
2. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan Persidangan :
 - 1) pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);⁴⁰
 - 2) apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2003);⁴¹
 - 3) apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian, dan kesimpulan. Dalam tahap jawab-menjawab (sebelum pembuktian) tergugat dapat

³⁹ Frans Hendra Winarta. *Loc.cit.* Hal 2.

⁴⁰ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

⁴¹ Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2003.

mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) (Pasal 132a HIR, 158 R.Bg);

Putusan Pengadilan Agama atas cerai gugat talak sebagai berikut :

- 1) gugatan dikabulkan. Apabila tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama.
- 2) Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama.
- 3) Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan baru
4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka Panitera Pengadilan Agama memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.⁴²

b. Bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi

Non litigasi adalah proses penyelesaian perkara diluar pengadilan.⁴³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut berjudul *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan beberapa bentuk penyelesaian sengketa yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain:

⁴² Panitera. *Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat*. <http://pa-muaratebo.go.id>. Di Unduh Tanggal 20 November 2017.

⁴³ Rachmadi Usman. 2012. *Mediasi di Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 8.

- 1) Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
- 2) Negosiasi: suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
- 3) Mediasi: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- 4) Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
- 5) Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.⁴⁴

Dalam hukum acara peradilan agama terdapat azas islah dimana disetiap proses dalam persidangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara wajib memberikan proses mediasi terhadap para pihak yang bersengketa. Adapun proses mediasi diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, didalam proses mediasi dikenal istilah mediator, mediator memiliki peran membantu para pihak

⁴⁴ Frans Hendra Winarta. *Op.cit.* Hal 8.

yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang di persengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi berjalan sehingga menghasilkan kesepakatan (agreement) dari para pihak.⁴⁵

D. Gugatan Cerai

1. Pengertian Gugatan Cerai

Gugatan cerai atau cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, gugatan harus ditunjukkan kepada pengadilan daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam disebut *Khulu'* perceraian atas keinginan pihak isteri, sedangkan suami tidak menghendaki.⁴⁶

⁴⁵ Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, cet. I.* Jakarta. Kencana. Hal 7.

⁴⁶ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjianti. 1997. *Hukum Perdata Islam.* Bandung. Mandar Maju. Hal 33.

Gugatan cerai atau cerai gugat yang dikenal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat 1 PP 9/1975).

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Dalam konteks hukum Islam yang terdapat dalam KHI, istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jika dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: *“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”*⁴⁷

⁴⁷ Pasal 132 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 132 ayat (2) KHI yang berbunyi: “*Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama*”.

2. Tahapan Pemeriksaan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (istri), kecuali jika penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami).
- b. Jika penggugat berkediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- c. Jika keduanya berkediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat.⁴⁸
- d. Jika gugatan perceraian adalah karena salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk dapat memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang memutuskan perkara disertai

⁴⁸ Pasal 73 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

keterangan yang menyatakan bahwa, putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁹

- e. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.⁵⁰
- f. Jika alasan perceraian adalah karena *Syiqaq* (perselisihan tajam dan terus menerus antara suami dan istri, maka putusan perceraian didapatkan dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi.⁵¹
- g. Gugatan perceraian gugur jika suami atau istri meninggal sebelum ada putusan pengadilan.⁵²
- h. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian di daftarkan di kepaniteraan.⁵³
- i. Putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁴

⁴⁹ Lihat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

⁵⁰ Lihat Pasal 75.

⁵¹ Lihat Pasal 76 ayat (1).

⁵² Lihat Pasal 79.

⁵³ Lihat Pasal 80 ayat (1).

⁵⁴ Lihat Pasal 81 ayat (1) dan (2).

- j. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali salah satu pihak berkediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- k. Jika kedua belah pihak berkediaman di luar negeri, maka pada sidang pertama penggugat harus menghadap pribadi.
- l. Pada saat tersebut hakim juga harus mendamaikan kedua belah pihak, dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.⁵⁵
- m. Jika perdamaian tercapai, maka tidak dapat diajukan lagi gugatan perceraian yang baru dengan alasan yang ada.⁵⁶
- n. Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- o. Jika pihak ke-3 menuntut, maka pengadilan agama menunda lebih dulu perkara harta bersama sampai ada putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁷

⁵⁵ Lihat Pasal 82 ayat (1) sampai (4).

⁵⁶ Lihat Pasal 83.

⁵⁷ Lihat Pasal 86 ayat (1) dan (2).